

PENINGKATAN KUALIFIKASI GURU DAN PROGRAM PENYETARAAN

I G.A.K. Wardani

Mutu pendidikan merupakan salah satu tolok ukur yang menentukan martabat atau kemajuan suatu bangsa. Dengan mencermati mutu pendidikan suatu bangsa/negara, seseorang akan dapat memperkirakan peringkat negara tersebut di antara negara-negara di dunia. Oleh karena itulah, bangsa yang maju akan selalu menaruh perhatian besar terhadap dunia pendidikannya, dengan melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan, seperti meningkatkan anggaran pendidikan, menyelenggarakan berbagai lomba dalam berbagai aspek pendidikan, atau mengirimkan para tunas bangsa untuk menimba ilmu di negara lain. Beragam upaya ini dilakukan karena kesadaran akan pentingnya pendidikan, dan keyakinan bahwa bangsa yang mengabaikan pendidikan akan menjadi bangsa yang tertinggal, yang akan kalah bersaing dengan bangsa-bangsa lain.

Di Indonesia, rendahnya mutu pendidikan merupakan salah satu dari empat masalah pokok pendidikan yang telah diidentifikasi sejak tahun 60-an. Perhatian terhadap pendidikan memang cukup besar, namun meskipun sudah banyak usaha yang dilakukan, sampai kini masalah mutu pendidikan tampaknya belum dapat diatasi. Keluhan tentang rendahnya mutu lulusan masih terus bergema. Lulusan SD, SLTP, dan SLTA belum mampu bernalar dan berpikir kritis, serta masih tergantung kepada guru (D. Nielson, dkk, 1996; Nasoetion, 1996). Kemampuan siswa untuk mandiri belum terwujud, sehingga prakarsa siswa untuk memulai sesuatu tidak terlampau sering ditemukan. Penguasaan siswa lebih terfokus pada pengetahuan faktual karena itulah yang dituntut dalam ujian akhir. Ujian nasional lebih banyak menuntut kemampuan siswa untuk menghafal daripada mempersyaratkan mereka berpikir kritis atau mendemonstrasikan keterampilan. Rendahnya Nilai Ebtanas Murni

(NEM) tahun 1997/1998 dan tahun 1998/1999 yang diberitakan dalam berbagai media massa juga merupakan indikator mutu pendidikan yang belum sesuai dengan harapan. Bahkan pada tahun 2006, ketika NEM berganti baju menjadi ujian nasional atau sering juga disebut ujian akhir nasional (UAN), hasil yang dicapai para siswa sempat menghebohkan karena banyaknya siswa yang tidak lulus dari SMP atau SMA yang diakibatkan oleh rendahnya nilai UAN yang dicapai. Hal ini menjadi lebih memprihatinkan lagi karena rendahnya standar kelulusan untuk matapelajaran yang diujikan secara nasional.

Pangkal penyebab dari semua ini tentu sangat banyak tetapi tudingan utama banyak ditujukan kepada guru karena gurulah yang merupakan ujung tombak di lapangan yang bertemu dengan siswa secara terprogram (Wardani, 1998). Oleh karena itu, guru dianggap sebagai pihak yang paling bertanggung jawab terhadap hasil yang dicapai oleh siswa. Apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah seperti ini? Siapa yang harus bertanggung jawab? Pertanyaan-pertanyaan seperti itu tentu muncul pada setiap warga negara yang peduli pada masa depan bangsa, dan merupakan tantangan besar bagi Departemen Pendidikan Nasional, khususnya bagi lembaga penghasil guru.

Untuk menjawab tantangan yang ditujukan kepada guru tersebut, berbagai upaya telah dilakukan dalam peningkatan kemampuan guru. Berbagai penataran guru, baik yang dilakukan secara berkala maupun yang dilakukan secara berkesinambungan telah dilakukan. Di samping itu, kesejahteraan guru, yang disadari merupakan tiang penyangga dari kualitas layanan yang diberikan guru, juga sudah mulai diperhatikan, meskipun dalam skala yang sangat kecil. Pemberian insentif bagi guru yang mengajar di daerah terpencil dan pemberian tunjangan fungsional bagi guru telah pernah dilakukan. Selain upaya yang secara khusus dilakukan untuk meningkatkan kemampuan profesional dan kesejahteraan guru, upaya yang sangat penting adalah upaya untuk meningkatkan kualifikasi guru yang telah dilakukan sepanjang masa.

Dalam sejarah pendidikan di Indonesia, peningkatan

kualifikasi guru dilakukan secara bertahap. Tahun 50-an, persyaratan bagi guru Sekolah Dasar (SD) adalah berijazah Sekolah Guru B (SGB), yaitu jenjang pendidikan setara SLTP plus (empat tahun setelah SD); sedangkan bagi guru SMP (SLTP) dipersyaratkan berijazah Sekolah Guru A (SPG), yaitu jenjang pendidikan setara SLTA. Tahun 60-an, persyaratan kualifikasi ini meningkat. Guru SD dipersyaratkan berijazah Sekolah Pendidikan Guru (SPG), yang setingkat dengan SLTA; sedangkan guru SMP dipersyaratkan berijazah Pendidikan Guru Sekolah Lanjutan Pertama (PGSLTP). Tahun 1989, dengan dikeluarkannya Surat Keputusan (SK) Mendikbud Nomor 0854/U/1989, persyaratan untuk guru SD ditingkatkan menjadi setara Diploma II. Sementara itu, tuntutan kualifikasi guru SLTP dan guru SLTA juga meningkat, meskipun peraturan resmi tidak ada. Guru SLTP dituntut untuk berijazah minimal setara Diploma III, sedangkan guru SLTA dipersyaratkan berkualifikasi sarjana (S1). Berbagai usaha untuk mewujudkan hal ini juga telah dilakukan.

Para guru yang perlu ditingkatkan kualifikasinya tersebut berada di seluruh wilayah tanah air. Ada yang berdomisili di kota, di pinggiran kota, di desa, bahkan di tempat yang terpencil atau sangat terpencil. Para guru yang berada di kota, terutama di kota yang ada Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK), dapat melanjutkan studi sambil bekerja, meskipun hal ini dianggap agak berat. Namun, para guru yang berada jauh dari LPTK, tentu mustahil meninggalkan tugasnya untuk melanjutkan sekolah. Di samping kendala sosial ekonomi, dari segi kelangsungan pendidikan di sekolah, para guru ini tidak mungkin meninggalkan tugasnya untuk melanjutkan sekolah. Oleh karena itu, dicarilah satu sistem yang memungkinkan para guru melanjutkan studi sambil tetap mengajar.

Universitas Terbuka (UT), yang sampai dengan tahun 2005 merupakan satu-satunya perguruan tinggi yang menerapkan sistem belajar terbuka dan jarak jauh, menjadi pilihan utama. Pilihan ini menjadi sangat tepat karena para guru dapat melanjutkan studi tanpa harus meninggalkan tugasnya sebagai guru. Di samping itu,

program-program UT dapat menjangkau mahasiswa yang berada di seluruh pelosok tanah air. Oleh karena itu, berbagai penugasan yang berkaitan dengan peningkatan kualifikasi guru diberikan kepada UT.

Berikut ini diuraikan profil Program Penyetaraan DII Pendidikan Guru Sekolah Dasar (Program Penyetaraan DII PGSD) dan Program Penyetaraan DIII Pendidikan Guru Sekolah Menengah (Program Penyetaraan DIII PGSM) yang dikelola oleh Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) UT, sejak mulai dibuka sampai dengan tahun 1999. Profil program ini menjadi penting untuk dideskripsikan karena merupakan profil awal yang kemudian terus berkembang sesuai dengan tuntutan dan perubahan kebijakan. Untuk setiap program akan dipaparkan secara singkat profil masukan, kurikulum, penyelenggaraan, serta jumlah mahasiswa dan lulusan. Profil awal ini kemudian akan dilengkapi dengan perkembangan program penyetaraan sampai dengan awal 2007, baik untuk Program Penyetaraan DII PGSD, maupun untuk Program Penyetaraan DIII PGSM. Sebagai penutup, artikel ini akan diakhiri dengan kesimpulan tentang peran program penyetaraan dan pendidikan jarak jauh (PJJ) dalam peningkatan kualifikasi guru, serta pelajaran yang dapat dipetik dari penyelenggaraan kedua jenis program ini.

PROGRAM PENYETARAAN DII-PGSD: 1990/1991-1998/1999

Dengan dikeluarkannya SK Mendikbud Nomor 0854/U/1989, para guru SD yang umumnya berijazah SPG atau setingkat menjadi tidak memenuhi persyaratan kualifikasi yang dituntut dalam surat keputusan tersebut. Untuk meningkatkan kualifikasi mereka, dikembangkan Program Penyetaraan DII PGSD (untuk guru kelas serta guru Pendidikan Jasmani dan Kesehatan), yang mulai menerima mahasiswa baru pada tahun akademik 1990/1991. Program ini merupakan program kerjasama antara Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Dirjen Dikti) dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Dirjen Dikdasmen). Karena program ini diniatkan untuk para guru yang berada di

seluruh pelosok tanah air, UT sebagai perguruan tinggi yang menerapkan sistem PTJJ, diberi tugas untuk mengelola program ini.

Masukan program ini adalah para guru SD yang berijazah SPG atau sederajat, berstatus sebagai guru SD, dan diutamakan yang sudah menjadi pegawai negeri, berusia 25-45 tahun (khusus bagi kepala sekolah yang berprestasi, usia maksimal 50 tahun), serta memiliki kemampuan dan kemauan untuk meningkatkan kualifikasi. Karena peningkatan kualifikasi guru SD ini dibiayai oleh pemerintah pusat melalui APBN maka rekrutmen calon mahasiswa dilakukan oleh Kantor Wilayah (Kanwil) Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (Depdikbud) berserta jajarannya di tingkat kabupaten dan kecamatan dengan berpedoman pada kriteria yang telah ditetapkan. Untuk setiap kelompok belajar (pokjar) direkrut 30 orang mahasiswa.

Sementara itu, karena keterbatasan kemampuan APBN yang disalurkan dalam bentuk beasiswa yang disediakan oleh Pemerintah, para guru yang tidak mendapat beasiswa membiayai sendiri studinya (swadana). Calon mahasiswa swadana melakukan pendaftaran sendiri ke Unit Program Belajar Jarak Jauh (UPBJJ)-UT setempat. UPBJJ-UT kemudian menyeleksi calon mahasiswa berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Mahasiswa swadana membentuk pokjar sendiri dengan jumlah mahasiswa yang sama dengan pokjar mahasiswa beasiswa (lazim pula disebut mahasiswa proyek), yaitu maksimal 30 orang. Dengan demikian, dalam satu kecamatan dimungkinkan ada dua pokjar yang berbeda.

Meskipun program ini adalah program penyetaraan yang semestinya mengacu kepada program prajabatan, kurikulum dikembangkan bersamaan dengan pengembangan Kurikulum DII PGSD Prajabatan. Hal ini terjadi karena Program DII PGSD Prajabatan juga mulai dibuka pada tahun akademik yang sama (1990/1991). Pengembangan kurikulum dan penulisan bahan ajar dilakukan dengan melibatkan para dosen/pakar dari berbagai Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK), seperti IKIP Jakarta, IKIP Bandung, IKIP Yogyakarta, dan IKIP Malang, serta para guru SD yang berpotensi. Beban studi penuh untuk Program

Penyetaraan DII PGSD adalah 82 sks, dengan masa studi enam semester.

Dalam Kurikulum 1990 tersebut, satu hal yang menarik yang perlu dicatat adalah penghargaan terhadap pengalaman mengajar para guru. Pengalaman mengajar tersebut dihargai dengan pembebasan matakuliah, yang bobot sksnya tergantung dari jumlah tahun pengalaman mengajar para guru, yaitu 8 sks untuk guru yang berpengalaman mengajar 5-8 tahun, 10 sks untuk yang berpengalaman mengajar 9-12 tahun, dan 16 sks untuk yang telah mengajar lebih dari 12 tahun. Matakuliah yang dibebaskan adalah matakuliah yang diasumsikan telah dikuasai oleh para guru karena berkaitan erat dengan tugas mengajarnya.

Kurikulum 1990 ini telah disempurnakan pada tahun 1996 (dengan nama Kurikulum 1996) dan diberlakukan mulai tahun akademik 1997/1998. Penyempurnaan mengacu kepada kurikulum DII PGSD Prajabatan 1995, serta berbagai masukan dari lapangan. Dalam Kurikulum 1996, beban studi keseluruhan menjadi 78 sks, masa studi diperpendek menjadi lima semester (tentu saja dengan beban studi per semester makin tinggi), dan pembebasan matakuliah berdasarkan pengalaman mengajar pun direvisi. Pembebasan matakuliah hanya diberikan kepada dua kelompok pengalaman mengajar, yaitu pengalaman mengajar 5-10 tahun dihargai dengan pembebasan 6 sks, dan pengalaman mengajar 11 tahun atau lebih dihargai dengan pembebasan 8 sks. Matakuliah yang dibebaskan hanya terdiri dari Matakuliah Dasar Umum (MKDU). Di samping pembebasan melalui pengalaman mengajar, para mahasiswa yang memenuhi syarat juga diberi kesempatan untuk mengajukan penganugrahan kredit berdasarkan Penilaian Hasil Belajar Melalui Pengalaman (HBMP).

Untuk memandu para penyelenggara program, UT telah mengembangkan seperangkat Panduan Penyelenggaraan Program DII PGSD (disingkat PPD). Cakupan Panduan ini meliputi sistem penyelenggaraan, kurikulum dan deskripsi matakuliah, registrasi, bahan ajar, tutorial, praktikum, Pemantapan Kemampuan Mengajar (PKM), ujian, sampai pengelolaan di daerah. PPD ini

disempurnakan secara berkala berdasarkan masukan dari lapangan. Masukan datang dari para tutor, pengelola, mahasiswa, dan pengembang program. Dalam rapat koordinasi, masukan tersebut dibahas dan hasilnya digunakan untuk menyempurnakan PPD. Sejalan dengan penyempurnaan yang dilakukan dan kebutuhan yang muncul, jumlah PPD juga berubah, mulai dari delapan buah (PPD 1 s.d. PPD 8), yaitu mulai dari sistem penyelenggaraan sampai ujian, menjadi 11 PPD (PPD 0 s.d PPD 10) mulai dari Struktur Program dan Deskripsi Matakuliah (PPD 0), Sistem Penyelenggaraan Program (PPD 1) sampai dengan Pengelolaan Administrasi Daerah (PPD 10).

Untuk membantu mahasiswa menguasai kemampuan yang dituntut dalam modul dan menerapkannya dalam pembelajaran di SD, UT menyediakan program tutorial tatap muka yang wajib diikuti oleh mahasiswa. Di samping tutorial, mahasiswa wajib mengikuti praktikum IPA dan Pematapan Kemampuan Mengajar (PKM), yang disupervisi oleh instruktur praktikum dan supervisor PKM. Karena PKM merupakan muara program, maka tujuan utama yang ingin dicapai adalah agar para mahasiswa mampu menerapkan segala pengetahuan, keterampilan, dan sikap nilai yang diperolehnya dalam semua matakuliah ke dalam pembelajaran di kelasnya sendiri. Oleh karena itulah, kegiatan latihan penerapan tersebut dilakukan di sekolah mahasiswa sendiri dengan supervisi dari para supervisor PKM. Semua kegiatan akademik ini diselenggarakan oleh kelompok belajar di tingkat kecamatan. Penguasaan mahasiswa dinilai melalui tugas mandiri (TM), ujian akhir semester (UAS), laporan praktikum, ujian praktek, dan ujian PKM.

Para tutor, instruktur praktikum, dan supervisor PKM adalah para pendidik yang berpendidikan minimal Diploma III Kependidikan dengan bidang studi yang relevan dan diutamakan yang mempunyai pengalaman mengajar di SD. Sebelum melaksanakan tugas, mereka mendapat pelatihan dari para tutor inti, baik dalam pendalaman materi, maupun dalam pengelolaan tutorial, praktikum, dan PKM. Para tutor inti dilatih di tingkat pusat, dengan materi pelatihan yang disiapkan dan disajikan oleh FKIP-UT

bersama para penulis modul, sedangkan pelatihan bagi para tutor, instruktur praktikum, dan supervisor PKM berlangsung di daerah, dengan tutor inti sebagai pelatihnya.

Jumlah guru yang mengikuti program penyetaraan bervariasi dari tahun ke tahun. Disamping mahasiswa yang mendapat beasiswa dari APBN (pemerintah pusat) atau APBD (pemerintah daerah), terdapat banyak mahasiswa yang membiayai diri sendiri (swadana). Tabel 1 menggambarkan jumlah mahasiswa dan lulusan dari tahun ke tahun untuk mahasiswa beasiswa (proyek) dan mahasiswa swadana.

Tabel 1. Jumlah Mahasiswa dan Lulusan per Angkatan Program Penyetaraan DII PGSD (sampai dengan Februari 1999)

No	Angkatan Tahun	Mahasiswa Beasiswa*)		Mahasiswa Swadana	
		Jumlah Awal	Sudah lulus	Jumlah Awal	Sudah Lulus
1	1990/1991	21.979	18.681	2.578	2.074
2	1991/1992	30.641	26.424	21.241	17.793
3	1992/1993	19.445	15.628	29.890	24.666
4	1993/1994	58.859	45.448	31.281	24.528
5	1994/1995	36.106	20.182	27.363	16.136
6	1995/1996	6.183	934	33.869	7.486
7	1996/1997	12.683	-	34.307	**)-
8	1997/1998	68.699	-	14.827	**)-
9	1998/1999	28.032	-	3.271	**)-
Jumlah		282.627	127.297	198.627	92.683

*) Termasuk mahasiswa DII Pendidikan Guru Pendidikan Jasmani dan Kesehatan (DII Pendidikan Guru Penjaskes)

**)- Pada waktu data ini dikeluarkan, lulusan untuk masukan tahun 1996/1997 belum ada karena untuk menyelesaikan program, seorang mahasiswa minimal menyelesaikannya dalam enam semester atau tiga tahun, dan untuk masukan mulai tahun 1997/1998 diperlukan minimal 5 semester.

Dari Tabel 1 dapat dilihat bahwa jumlah mahasiswa yang membiayai diri sendiri cukup banyak, yaitu 41% dari guru yang telah memasuki program (198.627 orang dari 481.254 orang). Hal ini merupakan satu indikator tingginya minat para guru untuk meningkatkan kemampuan dan kualifikasi pendidikan. Jumlah lulusan yang sudah mencapai 219.980 orang menunjukkan peran nyata PTJJ dalam meningkatkan kualifikasi guru.

PROGRAM PENYETARAAN D-III PGSMP: 1992/1993–1997/1998

Program DIII PGSMP ini dibuka pada tahun akademik 1992/1993, dengan Program Studi Pendidikan MIPA (Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam). Tahun 1994/1995 dibuka program studi Pendidikan Bahasa Inggris, dan tahun 1997/1998 dibuka program studi Pendidikan Bahasa Indonesia. Seperti halnya dengan Program Penyetaraan DII PGSD, program ini juga merupakan kerja sama antara Ditjen Dikdasmen dengan Ditjen Dikti, dalam hal ini UT. Oleh karena itu, pembukaan program ini didasarkan atas permintaan dari Ditjen Dikdasmen, dalam hal ini Direktorat Pendidikan Guru dan Tenaga Teknis (Dit. Dikguten) sebagai pembina guru di lingkungan Ditjen Dikdasmen.

Mahasiswa program ini terdiri dari para guru SMP (SLTP) dengan latar belakang pendidikan Diploma I atau Diploma II bidang studi yang sejenis. Karena latar belakang yang berbeda, lama atau masa studi kedua masukan ini berbeda. Dengan mempertimbangkan tugas rutin seorang guru yang sedang menempuh program ini, beban studi setiap semester berkisar antara 12-15 sks. Oleh karena itu, lama studi masukan D I adalah enam semester, sedangkan lama studi masukan DII adalah tiga semester.

Kurikulum dikembangkan berdasarkan analisis kebutuhan para guru SLTP serta mengacu kepada Kurikulum DIII Kependidikan Prajabatan. Analisis kebutuhan dilakukan dengan mengkaji berbagai hasil penelitian, diantaranya hasil penelitian yang dilakukan dan dilaporkan oleh Jiono, 1992; Nasoetion, 1985; dan Egelstone, J., 1984, serta menelaah masukan dari pengguna lulusan,

dalam hal ini dari Dit. Dikgutenis dan Direktorat Pendidikan Menengah Umum (Dit. Dikmenum). Pengembang kurikulum adalah para pendidik dan pakar bidang studi dari berbagai IKIP serta universitas negeri dan swasta, seperti IKIP Bandung, IKIP Surabaya, IKIP Semarang, IKIP Jakarta, dan IKIP Yogyakarta, disamping instruktur dan guru inti Pemantapan Kerja Guru (PKG).

Sama halnya dengan Program Penyetaraan DII PGSD, mahasiswa Program DIII PGSMP diharapkan mampu belajar mandiri dengan bahan belajar utama berupa modul. Untuk memfasilitasi kemampuan belajar mandiri, UT menyediakan program bantuan belajar berupa tutorial tatap muka, praktikum/praktik, dan Pemantapan Kemampuan Mengajar (PKM). Kegiatan akademik berlangsung di kelompok belajar pada tingkat kabupaten/kota madya, dibimbing oleh para tutor, instruktur praktikum, dan supervisor PKM, serta dengan memanfaatkan fasilitas yang ada di SLTP setempat.

Jumlah mahasiswa yang memasuki program ini bervariasi menurut jumlah alokasi beasiswa untuk setiap tahun. Berbeda dengan Program Penyetaraan DII Guru SD, semua mahasiswa Program Penyetaraan DIII PSMP adalah mahasiswa beasiswa. Jumlah mahasiswa yang masuk dan yang telah lulus sampai dengan tahun akademik 1997/1998 untuk setiap program tergambar dalam Tabel 2.

Tabel 2. Jumlah Mahasiswa dan Lulusan DIII PGSMP sampai dengan Tahun 1997/1998

No.	Program Studi	Tahun Program Dibuka	Jumlah Mahasiswa	Jumlah Lulusan	Jumlah yang Belum Lulus
1.	Pendidikan Matematika	1992/1993	19.226	13.116	6.110
2.	Pendidikan IPA	1992/1993	16.176	9395	6.781
3.	Pendidikan Bahasa. Inggris	1994/1995	10.092	2.352	7.740

4.	Pendidikan Bahasa Indonesia	1997/1998	8.097	-*)	8.097
	Total		53.591	24.683	28.908

*) Program ini baru dibuka tahun 1997/1998, sehingga belum ada lulusan.

Dari Tabel 2 dapat dilihat jumlah mahasiswa yang mendaftar dan yang sudah lulus dari Program Penyetaraan DIII PGSMMP. Jumlah lulusan yang sudah mencapai 24.683 orang dapat menggambarkan betapa besar peran PJJ dalam meningkatkan kualifikasi guru SLTP. Peran ini akan masih terus diperlukan karena setelah empat jenis program dibuka, program lain menyusul, sehingga seluruh guru bidang studi di SLTP dapat meningkatkan jenjang pendidikannya. Program studi yang segera akan menyusul adalah program studi yang terkait dengan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS). Dengan demikian, guru-guru SLTP dari lima bidang studi kemudian dapat memanfaatkan keberadaan UT untuk meningkatkan kualifikasinya.

PERKEMBANGAN SAMPAI AWAL TAHUN 2007

Sebagaimana diisyaratkan pada bagian terdahulu, baik Program Penyetaraan DII PGSD maupun DIII PGSMMP merupakan cikal bakal dari program-program peningkatan kualifikasi guru yang dikembangkan selanjutnya. Kedua jenis program ini berlanjut terus dan berkembang sesuai dengan tuntutan kebutuhan dan perubahan kebijakan di tingkat nasional. Secara umum, minimal ada dua hal yang perlu dicatat dalam perkembangan kedua program ini.

Hal pertama adalah kesempatan yang diberikan kepada mahasiswa untuk memohon penganugrahan kredit melalui penilaian Hasil Belajar Melalui Pengalaman (HBMP). Meskipun kesempatan ini sudah dibuka dan disosialisasikan bagi Program Penyetaraan DII PGSD sejak tahun akademik 1997/1998, namun tidak seorang mahasiswapun yang memanfaatkan kesempatan ini. Berbeda halnya dengan mahasiswa Program Penyetaraan DII PGSD. Beberapa orang mahasiswa Program Penyetaraan DII PGSD memanfaatkan

kesempatan ini. Namun dari sejumlah mahasiswa yang mengajukan permohonan penganugrahan kredit, hanya seorang yang berhasil mendapat penganugrahan kredit.

Minimnya jumlah mahasiswa yang memanfaatkan kesempatan ini dapat ditinjau paling tidak dari dua alasan. Pertama, tampaknya para mahasiswa lebih memilih mengambil matakuliah daripada harus mengumpulkan berbagai bukti kemampuan yang diperlukan untuk penganugrahan kredit. Hal ini mungkin juga berakar dari belum membudayanya kebiasaan mendokumentasikan berbagai dokumen penting di kalangan para guru sehingga ketika dokumen tersebut diperlukan, para guru sulit untuk menemukannya. Kedua, mungkin karena memang para guru ini merasa tidak memiliki kemampuan yang memadai untuk penganugrahan kredit. Kondisi seperti ini patut dipertimbangkan pada masa yang akan datang jika lembaga pendidikan guru akan menghargai pengalaman mengajar para guru.

Hal kedua yang perlu dicatat adalah bahwa sejak tahun 2001, nama penyeteraan tidak lagi digunakan sehingga nama program menjadi Program Diploma II Pendidikan Guru Sekolah Dasar (Program DII PGSD) dan Program Diploma III Pendidikan Guru Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (Program DIII PGSLTP), yang kemudian berubah lagi menjadi Program Diploma III Pendidikan Guru Sekolah Menengah Pertama (Program DIII PGSMP), sesuai dengan perubahan kebijakan di tingkat nasional. Penghilangan istilah penyeteraan diawali oleh keinginan untuk meningkatkan citra program ini di kalangan para guru. Istilah penyeteraan dianggap membuat program ini seolah-olah tidak sama dengan program kependidikan prajabatan sejenis, padahal isi program sebenarnya sama. Dengan hilangnya istilah penyeteraan, berarti program ini dianggap sama, bukan setara dengan program sejenis yang dibuka oleh LPTK tatap muka.

Disamping hal-hal yang sama, masing-masing program juga memiliki kekhususan dalam perkembangannya. Berikut ini diuraikan secara singkat kekhususan perkembangan tersebut untuk setiap program.

1. Program DII PGSD

Program Penyetaraan DII PGSD masih terus menjadi salah satu pilihan para guru SD yang ingin meningkatkan kualifikasinya. Hal ini dapat dimaklumi paling tidak karena dua alasan. Pertama, dengan memilih program ini, untuk mengikuti pendidikan, para guru tidak perlu meninggalkan tugasnya sebagai guru dan kedua, biaya yang cukup terjangkau membuat para guru tidak menanggung beban finansial yang terlalu berat. Disamping itu, adanya upaya UT untuk mendapatkan beasiswa bagi para guru melalui kerja sama dengan pemerintah daerah yang dirintis sejak tahun 2000, membuat program ini menjadi pilihan utama bagi para guru.

Dari segi program, tidak banyak perubahan yang terjadi karena penerapan Kurikulum 1996 yang dimulai pada tahun akademik 1997/1998 masih tetap diterapkan dengan berbagai penyesuaian yang lebih banyak terfokus pada penyelenggaraan program. Satu perkembangan yang perlu dicatat dalam program ini adalah dikembangkannya program layanan bagi mahasiswa Aktif Lewat Masa Studi (ALMS) melalui kerja sama dengan Direktorat Tenaga Kependidikan (Dit. Tendik), sejak tahun 2002 sampai dengan 2005 (Dekan FKIP-UT, 2005). Program ini memberikan layanan tutorial khusus yang memacu mahasiswa DII PGSD yang belum lulus untuk belajar lebih giat sehingga mampu menyelesaikan studinya.

Pada tahun 2006 terjadi perubahan dalam Kurikulum Program DII PGSD. Perubahan ini terkait dengan adanya kerja sama antara UT dan Direktorat Pendidikan Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah, yang sedang gencar-gencarnya meluncurkan program Pemberantasan Buta Aksara (PBA). Untuk mengakomodasi program PBA ini, para guru SD yang sedang mengikuti Program DII PGSD dianggap tepat untuk menjadi salah satu ujung tombak di lapangan. Sehubungan dengan itu dikembangkan satu matakuliah yang memungkinkan para guru SD ini memiliki kemampuan untuk membimbing warga belajar (WB) dari buta aksara menjadi melek aksara. Matakuliah tersebut

berkode PGSD2407 dengan nama Pendidikan Masyarakat, dan dapat diambil oleh mahasiswa DII PGSD semester 4. Sebagai kompensasi, mahasiswa yang mengambil matakuliah ini dibebaskan 2 sks dari matakuliah Pendidikan Agama pada semester 5, sehingga mereka ini hanya wajib mengambil matakuliah Pendidikan Agama 2 sks dari yang semula 4 sks. Jumlah mahasiswa yang berpartisipasi dalam program uji coba PBA pada tahun 2006 ini adalah 579 orang, yang terdiri dari mahasiswa DII PGSD guru kelas 577 orang dan dua orang mahasiswa DII Pendidikan Olah Raga. Setiap mahasiswa ditugaskan membina tujuh orang WB. Pada tahun 2007, jumlah mahasiswa yang dilibatkan dalam program PBA meningkat hampir dua kali lipat seiring dengan peningkatan dana PBA yang disediakan oleh pemerintah.

Sementara itu, jumlah mahasiswa dan lulusan sejak dibukanya program ini pada tahun akademik 1990/1991 sampai dengan awal 2007 disajikan pada Tabel 3.

Sebagaimana sudah dipaparkan pada bagian terdahulu, program ini mendidik guru kelas SD dan Guru Pendidikan Jasmani dan Kesehatan di SD atau sering disebut DII Guru Penjaskes, yang kemudian berubah nama menjadi DII Pendidikan Olah Raga. Dari Tabel 3 dapat dilihat bahwa jumlah mahasiswa sejak dibukanya Program DII PGSD ini sampai tahun 2007 adalah 741.186 orang, dengan jumlah lulusan sebanyak 511.320 orang. Ini berarti, masih ada 229.866 orang yang belum lulus. Dibandingkan dengan jumlah mahasiswa dan lulusan pada tahun 1999 yang terdapat pada Tabel 1, jumlah ini menunjukkan peningkatan yang signifikan. Jumlah lulusan yang mencapai 511.320 orang dalam kurun waktu sekitar 16 tahun menunjukkan peran PJJ yang sangat signifikan dalam meningkatkan kualifikasi guru SD.

Tabel 3. Jumlah Mahasiswa dan Lulusan Program DII PGSD sampai dengan Awal 2007

No.	Program Studi	Jumlah Mahasiswa		Total Mahasiswa	Jumlah Lulusan		Total Lulusan
		Swadana	Beasiswa		Swd.	Beasiswa	
1.	Pendidikan Olah Raga	11.224	42.985	54.207	3.636	35.083	38.719
2.	DII PGSD Guru Kelas	336.123	350.854	686.400	202.119	270.482	472.601
	Total	347.347	393.839	741.186	205.755	305.565	511.320

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan dan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, kualifikasi guru dalam semua jenjang pendidikan ditingkatkan menjadi minimal sarjana (S1) atau Diploma 4. Untuk mengakomodasi perubahan ini, FKIP UT segera melakukan pembenahan. Sejak tahun 2002, UT bersama dengan enam LPTK lain (Universitas Negeri Jakarta, Universtas Atma Jaya, Jakarta, Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, Universitas Negeri Yogyakarta, Universitas Negeri Sebelas Maret, Solo, dan Universitas Negeri Malang) mendapat kepercayaan dari Ditjen Dikti untuk menyelenggarakan Program S1 PGSD. Dengan demikian, ketika diluncurkannya UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, UT sudah siap untuk berperan dalam meningkatkan kualifikasi guru SD sampai jenjang sarjana (S1 PGSD). Bahkan, sampai awal 2007, jumlah mahasiswa S1 PGSD sekitar 69 ribu orang, sedangkan lulusannya sudah mencapai sekitar 13 ribu orang.

Sesuai dengan kualifikasi guru SD yang minimal harus berpendidikan S1 PGSD seperti tuntutan dalam UU Nomor 14/2005 tentang Guru dan Dosen, maka Program DII PGSD secara berangsur-angsur ditutup (*phasing out*). Mulai semester 2007.1, Program ini tidak lagi menerima mahasiswa baru. Mahasiswa yang sudah ada dalam Program diberi kesempatan untuk menyelesaikan studi sampai dengan semester 2008.2 atau mengalih ke Program S1 PGSD. Namun demikian, Program DII Pendidikan Guru Olah Raga masih tetap dibuka karena UT belum

memiliki Program S1 Pendidikan Olah Raga.

Satu perkembangan lain yang perlu diketengahkan dalam kaitan dengan peningkatan kualifikasi guru yang diselenggarakan oleh FKIP-UT adalah pembukaan Program DII Pendidikan Guru Taman Kanak-kanak (DII PGTK) pada semester 2004.2. Program ini berada di bawah Jurusan Pendidikan Dasar bersama dengan Program DII Pendidikan Olah Raga, dan Program S1 PGSD. Program DII PGTK dibuka untuk meningkatkan kualifikasi guru TK dari lulusan setingkat SLTA menjadi setingkat Diploma II. Dengan demikian, semua mahasiswa program ini adalah guru TK, baik swasta maupun negeri. Sampai dengan awal 2007, jumlah mahasiswa DII PGTK sudah mencapai sekitar 14 ribu orang.

2. Program DIII PGSM

Mahasiswa DIII PGSM dari empat program studi terdahulu yang belum menyelesaikan studinya dalam kurun waktu yang diberikan harus membiayai sendiri penyelesaian studinya. Mahasiswa yang menyelesaikan studi dengan biaya sendiri diubah statusnya menjadi mahasiswa swadana (reguler), sehingga mereka disebut sebagai mahasiswa DIII Reguler. Sistem yang berlaku bagi program DIII Reguler ini sama dengan sistem yang berlaku bagi program reguler lainnya. Jumlah mahasiswa dan lulusan DIII PGSM dari empat program studi, sebelum diubah menjadi DIII Reguler, disajikan dalam Tabel 4.

Tabel 4. Jumlah Mahasiswa, Lulusan, dan Jumlah Mahasiswa yang Belum Lulus Program DIII PGSM (Data: 2 Februari 2007)

No.	Program Studi	Tahun Program Dibuka	Jumlah Mahasiswa	Jumlah Lulusan	Jumlah Mahasiswa yang Belum Lulus
1.	Pendidikan Matematika	1992/1993	19332	14428	4904
2.	Pendidikan IPA	1992/1993	16290	11320	4970

3.	Pendidikan Bahasa Inggris	1994/1995	10133	3924	6209
4.	Pendidikan. Bahasa Indonesia	1997/1998	8107	1434	6673
	Total		53862	31106	22756

Dari Tabel 4 dapat dilihat bahwa perkembangan jumlah mahasiswa empat program studi dari tahun akademik 1997/1998 sampai dengan diubahnya status program menjadi DIII Reguler tidak mencolok, bahkan dapat dikatakan hampir tidak ada penambahan (dari 53.591 pada tahun akademik 1997/1998 menjadi 53.882) ketika program DIII PGSM diubah menjadi DIII Reguler (bandingkan dengan Tabel 2). Hal ini dapat dipahami karena semua mahasiswa DIII PGSM ini adalah mahasiswa beasiswa. Pengalokasian beasiswa tentu didasarkan pada kebutuhan guru bidang studi tertentu pada kurun waktu tertentu pula. Namun demikian, dari segi jumlah lulusan, keempat program studi ini ada peningkatan, yaitu dari 24.683 lulusan menjadi 31.106 lulusan.

Sebagaimana sudah diisyaratkan pada uraian terdahulu, pada tahun akademik 1998/1999 dibuka dua Program Penyetaraan DIII PGSM, yaitu Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) serta Program Studi Pendidikan Ekonomi dan Koperasi (PEKO). Administrasi, kedua program ini adalah Program DIII Reguler, meskipun para mahasiswanya adalah mahasiswa beasiswa.

Menindaklanjuti UU Nomor 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan untuk efisien program kependidikan maka dengan SK Rektor Nomor 426a/J31/Kep/2003, terhitung mulai semester 2004.1 seluruh Program DIII Kependidikan FKIP-UT ditutup dan diintegrasikan ke dalam program sarjana yang sejenis. Ini berarti, bahwa sejak semester 2004.1 Program DIII Kependidikan tidak menerima mahasiswa baru dan mahasiswa yang sudah ada dalam program diberi kesempatan untuk menyelesaikan studinya sampai semester 2005.2. Dalam

realisasinya, masa untuk menyelesaikan studi ini diperpanjang sampai semester 2006.2. Selanjutnya, para mahasiswa yang belum lulus diarahkan untuk beralih ke Program Sarjana (S1) sejenis atau diberi Surat Keterangan Penempuhan Matakuliah bagi yang tidak ingin mengalih ke Program S1. Jumlah mahasiswa dan lulusan Program DIII Reguler sampai dengan awal 2007, disajikan dalam Tabel 5.

Tabel 5. Jumlah Mahasiswa, Lulusan, dan Jumlah Mahasiswa yang Belum Lulus Program DIII Reguler (Data: 8 Februari 2007)

No.	Program Studi	Jumlah Mahasiswa	Jumlah Lulusan	Jumlah Belum Lulus
1.	Pendidikan Matematika	1078	813	265
2.	Pendidikan IPA	1215	835	380
3.	Pendidikan Bahasa Inggris	1862	1665	197
4.	Pdd. Bahasa Indonesia	3122	2916	206
5.	Pendidikan Ekonomi dan Koperasi	2539	2144	395
6.	Pendidikan Pancasila dan Kewargaan Negara	1837	1706	131
	Total	11653	10079	1574

Dengan membandingkan angka pada Tabel 4 dan Tabel 5 dapat disimpulkan bahwa tidak semua mahasiswa dari empat program studi (Pendidikan Matematika, Pendidikan IPA, Pendidikan Bahasa Inggris, dan Pendidikan Bahasa Indonesia) yang belum lulus mau menyelesaikan studinya melalui Program DIII Reguler dengan biaya sendiri. Jumlah mahasiswa DIII Reguler per program studi lebih kecil dari mahasiswa yang belum lulus ketika masih berstatus mahasiswa DIII PGSM. Seharusnya, jika semua mahasiswa yang belum lulus tetap mendaftar untuk menyelesaikan studinya, jumlah ini harus sama. Di samping jumlah mahasiswa dan lulusan empat program studi, pada Tabel 5 juga tercantum jumlah mahasiswa dan lulusan Program DIII Pendidikan Ekonomi dan Koperasi serta Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Jumlah mahasiswa yang belum berhasil

menyelesaikan studi sampai dengan batas waktu terakhir cukup besar, yaitu 1574 orang. Jumlah inilah yang disarankan langsung mengalih ke Program S1 sejenis, atau akan diberi surat keterangan jika tidak berkeinginan beralih program.

Ketika PP Nomor 19 tahun 2005 dan UU Nomor 14 tahun 2005 diberlakukan, keputusan untuk menutup semua Program DIII Kependidikan, sebagaimana yang sudah diuraikan menjadi sangat relevan. Dengan penutupan program tersebut, pendidikan guru untuk sekolah menengah difokuskan pada program Pendidikan S1 Bidang Studi yang sudah diselenggarakan sejak berdirinya UT. Dalam hal ini FKIP-UT telah memiliki Program S1 Pendidikan Bahasa Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Fisika, Pendidikan Biologi, dan Pendidikan Kimia. Tahun 2003, dua program sarjana kependidikan, yaitu Program Studi S1 Pendidikan Ekonomi dan Koperasi (PEKO) dan S1 Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) dibuka berdasarkan ijin resmi dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Dengan demikian, UT sudah siap berperan dalam peningkatan kualifikasi guru sekolah menengah sampai jenjang sarjana (S1).

Dengan ditutupnya Program D II PGSD pada semester 2007.1 dan Program DIII Kependidikan pada semester 2004.1, maka program pendidikan guru yang diselenggarakan oleh FKIP-UT merupakan program pada jenjang sarjana (S1), kecuali Program D II Pendidikan Olah Raga dan Program D II PGTK. Hal ini membuktikan bahwa UT mempunyai komitmen yang tinggi untuk membantu peningkatan kualifikasi guru sesuai dengan tuntutan undang-undang.

KESIMPULAN

Dari uraian dapat disimpulkan bahwa program penyetaraan yang diselenggarakan oleh FKIP-UT memang merupakan cikal bakal dari berbagai program peningkatan kualifikasi guru SD dan SMP yang dikembangkan sesuai dengan tuntutan kebijakan pemerintah. Berbagai pendekatan, termasuk filosofi yang melandasi

program penyetaraan, masih tetap merupakan landasan utama program-program selanjutnya meskipun ada berbagai modifikasi yang disesuaikan dengan tuntutan kebijakan serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Berdasarkan jumlah lulusan yang sudah dihasilkan, program penyetaraan juga mempunyai peran penting dalam peningkatan kualifikasi guru. Peran ini menjadi lebih sentral karena program penyetaraan ini diselenggarakan melalui PJJ, sehingga guru dapat meningkatkan kualifikasinya tanpa meninggalkan tugas pokoknya sebagai guru. Jumlah guru yang sudah berhasil meningkatkan kualifikasinya dalam kurun waktu sekitar 16 tahun merupakan jumlah yang patut diperhitungkan. Dibandingkan dengan lulusan yang dihasilkan oleh LPTK tatap muka dalam kurun waktu yang sama, jumlah ini berada jauh di atasnya. Oleh karena itu, tampaknya peningkatan kualifikasi guru melalui PJJ merupakan salah satu alternatif utama.

Satu pelajaran yang dapat dipetik (*lesson learned*) dari program penyetaraan ini adalah mengenai penghargaan terhadap pengalaman mengajar para guru yang mengikuti program peningkatan kualifikasi, yang memang layak diperhitungkan. Namun, penganugrahan kredit melalui penilaian HBMP ternyata tidak menjanjikan karena banyaknya dokumen yang harus disiapkan dan rumitnya prosedur yang harus ditempuh untuk mendapat penganugrahan kredit. Oleh karena itu, perlu dipikirkan cara lain untuk menghargai pengalaman mengajar guru. Cara tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan, baik dari segi akademik maupun pengelolaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Dekan FKIP-UT. 2005. *Laporan Akhir Masa Jabatan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 2001-2005*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Depdikbud. 1995. *Pedoman penyelenggaraan program penyetaraan DII guru sekolah dasar (0 s.d. 10)*. Jakarta: Proyek Peningkatan Mutu Guru SD Setara DII.

- Depdikbud. 1992. *Panduan penyelenggaraan program penyetaraan DIII guru SMP (1 s.d. 8)*. Jakarta: Proyek Penataran Guru SLTP Setara DIII.
- Egelston, J. 1984. *A summative evaluation of pementapan kerja guru*. Jakarta: Ditjen Dikdasmen.
- Jiono. 1992. *Laporan penelitian kemampuan/pemahaman guru tentang IPA dan sarana pelajaran IPA di SMP*. Jakarta: Balitbang-Dikbud.
- Nasoetion, N. 1985. *Laporan penelitian proses belajar-mengajar bidang studi IPA di SPG negeri Cianjur*. Jakarta: Balitbang Dikbud.
- Nasoetion, N. 1996. *Laporan pendidikan IPA dan teknologi di SMP (Science and technology secondary education project)*. Naskah disajikan pada seminar Dies Natalis UT, 28 Agustus 1996.
- Nielson, D., Somerset, A., Mahadi, R., & Wardani, I G.A.K. 1996. *Sthrengthening Teacher Competency and Student Learning*. Jakarta: Direktorat Pendidikan Menengah Umum.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan.
- Surat Keputusan Mendikbud Nomor 0854/U/1989, tentang Pengadaan dan Penyetaraan Guru Sekolah Dasar.
- Surat Keputusan Rektor Universitas Terbuka Nomor 426a/J31./KEP/2003 tanggal 12 November 2003, tentang Penutupan Seluruh Program DIII FKIP Universitas Terbuka dan Pengintegrasian ke dalam Program Sarjana Sejenis.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia.
- Wardani, I G.A.K. 1998. *Pemberdayaan Guru: Suatu usaha peningkatan mutu pendidikan*. Naskah disampaikan sebagai Orasi Ilmiah pada Upacara Dies Natalis UT, 14 September 1998.